

# MOZAIK

## H U M A N I O R A

1. **Kekerasan Simbolik dalam *Nyali* Karya Putu Wijaya: Karya Sastra, Politik, dan Refleksi**  
Adi Setijowati .....1-14
2. **Pandangan Penutur Bahasa Jawa terhadap Cacar: Kajian Etnolinguistik**  
Ari Wulandari .....15-32
3. **Pola Antenatal Care dan Health Seeking Behavior Ibu Hamil Suku Mbojo, Bima, Nusa Tenggara Barat**  
Atik Triratnawati .....33-49
4. **Perempuan dalam Film-film Horor Hollywood Periode Tahun 2000-2017**  
Deandra Rizky Sagita .....50-63
5. **How Is Meaning Constructed in Indonesian Expression?**  
Deli Nirmala .....64-79
6. **Arsitektur Rumah Tradisional Suku Kajang di Provinsi Sulawesi Selatan**  
Erni Erawati Lewa .....80-92
7. **Portraying Literacy in Dolly Lane, a Red Light District (RDL): Qualitative Content Analysis on the Narratives Produced by Dolly Teenagers**  
Kartika Nuswantara, Eka Dian Savitri .....93-104
8. **Cultural Event Management in Promoting Siak as the “Truly Malay” for Strengthening Local Economy and Revitalizing Malay Culture**  
Noor Efni Salam .....105-111
9. **Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta**  
Purnawan Basundoro, Muhammad Madyan .....112-128
10. **Laki-laki vs Perempuan: Penggunaan Keterangan Penghubung dalam Tulisan Akademis**  
Viqi Ardaniah .....129-136



## **Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta**

### **(Reconstructing the History of the City Based on Cultural Heritage In the City of Surabaya, Makassar, and Yogyakarta)**

#### **Purnawan Basundoro**

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga  
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286  
Tel.: +62 (31) 5035676  
Surel: pbasundoro@fib.unair.ac.id

#### **Muhammad Madyan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Jalan Airlangga, Surabaya 60286  
Tel.: +62 (31) 5033642  
Surel: madyan@feb.unair.ac.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan perpaduan penelitian lapangan dan arsip kawasan cagar budaya dan bangunan yang bertujuan untuk merekonstruksi latar belakang sejarah kota-kota di Indonesia. Penelitian dilakukan di tiga kota, yaitu Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa kota-kota tersebut memiliki karakteristik sejarah yang berbeda. Penelitian arsip dilakukan di antaranya di Perpustakaan dan Badan Dokumentasi Kota Surabaya, Badan Perpustakaan dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Nasional Jakarta, Arsip Nasional Indonesia di Jakarta, Perpustakaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Pers Museum Surakarta, Kantor Arsip Makassar, Museum La Galigo Makassar, Museum Benteng Rotterdam Makassar, dan Museum Kota Makassar. Hasilnya menunjukkan bahwa kawasan cagar budaya, bangunan, dan benda umumnya mengacu pada sejarah tematik latar belakang historis kota-kota tersebut di masa lalu. Kota Surabaya memiliki karakter yang kuat sebagai kota perdagangan dan industri. Selain itu, ia juga memiliki sektor pemerintahan dan pendidikan sebagai karakter utama. Kota Makassar memiliki karakter yang kuat sebagai pusat pemerintahan lama dengan konflik internal mereka, dan sebagai kota pelabuhan. Kota Yogyakarta didirikan dari sisa-sisa konflik internal Kerajaan Mataram. Kota Yogyakarta telah berkembang menjadi pusat otoritatif tradisional dengan pengaruh budaya Jawa yang sangat kuat. Selama era kolonialisme, kota ini menjadi arena pertempuran simbolis antara Belanda dan pihak Kerajaan.

**Kata kunci:** cagar budaya, Makassar, kota Surabaya, Yogyakarta

#### **Abstract**

This study is a collaborative work between field and archival research of cultural heritage areas and buildings aiming to reconstruct the historical background of the cities in Indonesia. The study is done in three cities: Surabaya, Makassar, and Yogyakarta under the consideration that those cities possess different historical characteristics. Archival research was conducted in The Library and Documentation Board of Surabaya, The Library and Documentation Board of East Java Province, The National Library of Jakarta, The National Records of Indonesia in Jakarta, Public Library of Special Region of Yogyakarta, Museum Press of Surakarta, Archival Office of Makassar, Museum La

Galigo Makassar, Museum Benteng Rotterdam Makassar, and Museum Kota Makassar, to mention some. The result shows that the cultural heritage areas, buildings, and objects generally refer to thematic history of the historical background of those cities in the past. The city of Surabaya possesses a strong character as a trading and industrial city. Moreover, it also has governmental and educational sectors as prominent characters. The city of Makassar possesses a strong character as old governmental center with their internal conflicts, and as a city of harbor. The city of Yogyakarta was established from the remnants of the internal conflict of Mataram Kingdom. The city of Yogyakarta has developed into a traditional authoritative center with a very strong influence of Javanese culture. During colonialism era, the city became a symbolic battle arena between the Dutch and the Kingdom party.

**Keywords:** city, heritage, Makassar, Surabaya, Yogyakarta

## **PENDAHULUAN**

Sejak fenomena perkotaan muncul di bumi, saat itu pula kota menjadi pusat perhatian. Pada awalnya perhatian manusia terhadap kota tertuju pada ujud fisiknya karena kota-kota pada periode awal tumbuh sebagai ruang yang sangat berbeda dengan kawasan sekitarnya. Dampak pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di perkotaan menjadikan kawasan tersebut berkembang menjadi kawasan unik yang sangat berbeda dengan kawasan lainnya. Kota tumbuh menjadi kawasan dengan sejuta harapan, tetapi juga berkembang menjadi kawasan dengan berbagai permasalahan.

Keunikan kota kemudian menarik perhatian akademisi untuk mengkajinya. Beragam pengetahuan lahir dari realitas perkotaan, seperti sosiologi perkotaan, antropologi perkotaan, arsitektur perkotaan, tata kota, sejarah perkotaan, politik perkotaan, dan lain-lain. Di Indonesia kajian perkotaan merupakan hal yang relatif baru. Hampir dua puluh tahun yang lalu sejarawan utama Indonesia, Kuntowijoyo, dalam bukunya *Metodologi Sejarah* mengemukakan bahwa sejarah kota belum banyak mendapat perhatian kalangan sejarawan akademis. Pernyataan Kuntowijoyo seolah-olah menjadi peringatan bagi sejarawan di Indonesia, bahwa kota merupakan ranah yang harus dieksplorasi dari sisi sejarahnya, karena kota merupakan kawasan geografis yang mengalami perubahan paling cepat di dunia.

Upaya merekonstruksi sejarah kota-kota di Indonesia sebenarnya mulai dilakukan sejak pertengahan 1980-an, tetapi sebagian besar dilakukan oleh sejarawan asing. Beberapa hasil kajian mengenai hal tersebut misalnya dilakukan oleh Geertz (1986), Abeyasekere (1987), Dick (2002), dan lain-lain. Gairah untuk meneliti sejarah kota oleh sejarawan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gagasan Kuntowijoyo (1994), bahwa sudah waktunya perhatian para sejarawan diarahkan ke kota, karena kota merupakan pusat perubahan yang sangat cepat di dunia. Beberapa hasil studi yang saat ini beredar dan menjadi buku pegangan dalam mata kuliah Sejarah Kota antara lain yang dilakukan oleh peneliti (Basundoro 2009), Irwanto (2010), Makkelo (2011), Poelinggomang (2004), dan lain-lain.

Beberapa kelemahan referensi sejarah kota, baik yang berupa jurnal maupun buku, adalah sebagian besar referensi tersebut ditulis hanya mengacu pada referensi tertulis terdahulu, baik kepada sumber-sumber primer maupun sumber-sumber

sekunder. Uraian-uraian dalam buku tidak mengacu secara riil kepada peninggalan sejarah di kota. Hal tersebut menyebabkan para pembaca tidak mengetahui secara kenyataan (faktual) yang diuraikan dalam buku tersebut, di mana kawasan yang sedang diuraikan, dan seperti apa kawasan atau bangunan yang sedang diuraikan. Padahal, sebagian besar kawasan kota yang bersejarah beserta bangunan-bangunan penting sudah ditetapkan menjadi kawasan dan bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh hukum. Mengacu pada kondisi tersebut maka perlu disusun buku ajar atau buku referensi sejarah kota yang mengacu pada bangunan cagar budaya.

Hasil rekonstruksi sejarah kota berbasis pada kawasan dan bangunan cagar budaya memiliki dua aspek strategis sekaligus, yaitu sebagai referensi mengenai sejarah kota sekaligus sebagai upaya melakukan sosialisasi kawasan dan bangunan cagar budaya di perkotaan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2013:2).

Artikel ini merupakan hasil penelitian dalam rangka penyusunan buku ajar atau buku referensi sejarah kota berbasis bangunan dan kawasan cagar budaya di Kota Surabaya, Makassar, Yogyakarta. Permasalahan utama penelitian ini adalah, pertama, bagaimana perkembangan kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta jika mengacu pada kawasan dan bangunan cagar budaya setempat? Kedua, seperti apakah model penyusunan sejarah kota jika mengacu pada kawasan dan bangunan cagar budaya?

## **METODE**

Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu penelitian lapangan di kawasan dan bangunan cagar budaya, serta penelusuran sumber-sumber tertulis dan sumber foto. Kegiatan pertama untuk penelitian tahun pertama, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di kawasan cagar budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta. Kawasan dan bangunan cagar budaya yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2010, dengan kriteria antara lain berusia lima puluh tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia lima puluh tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Contoh kawasan dan bangunan yang sesuai dengan kriteria tersebut antara lain: (1) untuk Kota Surabaya adalah kawasan di seputar Jembatan Merah, kawasan pemukiman Darmo, kawasan Jalan Veteran, dan lain-lain; (2) di Kota Makassar bangunan cagar budaya antara lain Fort Rotterdam (Benteng Rotterdam), Stadshuis

(balai kota zaman kolonial), gedung kesenian, Pelabuhan Makassar, dan lain-lain; (3) bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta antara lain Kraton Yogyakarta, Benteng Vredeburg, Gedung Kesenian, dan lain-lain.

Kegiatan kedua, yaitu penelusuran sumber tertulis atau sumber sejarah, telah dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur, Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya, Perpustakaan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, dan beberapa tempat lainnya di Kota Surabaya, Kantor Arsip Kota Makassar, Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta, dan lain-lain. Kegiatan ketiga, penelusuran foto-foto Kota Surabaya lama dengan menggunakan teknologi internet, serta melakukan pemesanan dokumen sezaman ke lembaga terkait di luar negeri, yaitu KITLV, Leiden, Belanda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sejarah kota-kota di Indonesia, utamanya Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta mengalami beberapa fase perkembangan. Pertama, periode prakolonial. Pada periode ini ketiga kota tersebut masih berada dalam kekuasaan penguasa Bumiputra, yaitu para raja yang berkuasa atas daerah tersebut. Sebagian besar penguasa tersebut kurang mempedulikan kondisi kota karena lebih banyak mengupayakan perluasan dan mempertahankan kekuasaan. Peperangan antarkerajaan terus-menerus terjadi. Kota Surabaya pernah diserbu oleh pasukan Kerajaan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah dan menjadikan kota tersebut sebagai jajahan kerajaan pedalaman tersebut (Ricklefs 2008:198). Kekuasaan Mataram di Surabaya berakhir ketika Raja Mataram, Pakubuwono II, menyerahkan kawasan pesisir utara mulai dari Semarang sampai Surabaya kepada VOC pada 1743. Dengan demikian, setelah tahun tersebut Kota Surabaya berada di bawah kekuasaan VOC. Pada saat yang sama di Mataram terjadi pula pemberontakan yang terus terjadi, yang dilakukan oleh kerabat raja, sedikitnya empat pangeran melakukan pemberontakan kepada Pakubuwono II antara lain Mas Said, dan disusul oleh Mangkubumi. Akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Mangkubumi, Kerajaan Mataram akhirnya terbagi menjadi dua setelah dilakukan Perjanjian Giyanti yang difasilitasi oleh VOC tahun 1755, yaitu Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta (Ricklefs 2008:221).

Lahirnya Kerajaan Yogyakarta telah melahirkan pula Kota Yogyakarta, karena di kota itulah istana Kerajaan Yogyakarta didirikan oleh Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Kondisi yang sama terjadi pula di Makassar. Periode prakolonial di kawasan tersebut ditandai dengan terjadinya peperangan antarkerajaan. Kota Makassar mulai dikenal oleh masyarakat dunia karena posisi Pelabuhan Somba Opu yang sangat strategis di masanya, yakni secara geografis terletak di antara dua kerajaan penting saat itu, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Sebelum keduanya bersekutu, Gowa adalah sebuah kerajaan yang cukup tua dan sangat disegani di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowa berdiri sekitar abad ke-13. Konon raja pertamanya adalah seorang perempuan bernama Tumanurung, yang memerintah hingga sekitar tahun 1300. Jika ada yang mengatakan Gowa berdiri sejak abad ke-13, hal itu tidak berlebihan, sebab hingga pemerintahan VOC

berlangsung di Makassar, setidaknya terdapat 16 raja yang memimpin Kerajaan Gowa.



Gambar 1. Plengkung Benteng Kraton Yogyakarta  
(sumber: tropenmuseum.nl)

Pada periode prakolonial bangunan penting yang dibuat pada saat itu sebagian besar merupakan fasilitas kerajaan dan perbentengan. Di Kota Surabaya peninggalan periode tersebut nyaris sudah lenyap dimakan perkembangan kota yang amat pesat. Peninggalan prakolonial di kota Yogyakarta sebagian besar berada di dalam Kraton Yogyakarta yang merupakan tempat tinggal raja.

Kawasan kraton dikelilingi oleh benteng yang kuat yang memiliki beberapa pintu yang disebut plengkung (Basundoro 2012a:66). Tidak terlalu jauh dari area kraton terdapat pula tempat pesiar keluarga kerajaan yang disebut Tamansari. Kawasan tersebut pada mulanya berupa kolam raksasa yang diselingi bangunan-bangunan untuk kegiatan tertentu, sehingga dikenal dengan julukan *castle on the water*. Bangunan kraton, benteng, dan kompleks Tamansari saat ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Di kota Makassar peninggalan periode tersebut terkonsentrasi di kawasan Benteng Somba Opu yang merupakan kawasan pusat Kerajaan Gowa (Matulada 2011:14).



Gambar 2. Sisa-sisa Benteng Somba Opu di Kabupaten Gowa  
(sumber: akbar-tubagus.blogspot.co.id)

Kota-kota di Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak periode kolonial Belanda. Sejak kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, kota-kota dibangun dalam rangka melengkapi fasilitas untuk orang-orang Belanda tersebut. Bangunan-

bangunan yang menonjol antara lain bangunan kantor pemerintahan, fasilitas perdagangan, fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Sampai saat ini bangunan-bangunan tersebut ada yang masih bertahan dengan baik dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya karena memiliki nilai sejarah yang tinggi.

Pada akhir abad ke-19, perkembangan Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta mengalami peningkatan luar biasa. Hal tersebut dipicu kebijakan liberalisasi ekonomi yang membebaskan pengusaha swasta Eropa untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Sebagian besar modal swasta ditanamkan dalam sektor perkebunan, sisanya dalam sektor perdagangan, industri, transportasi, dan lain-lain (Lindblad 2002:244-263).

Liberalisasi ekonomi telah memengaruhi karakteristik kota-kota di Indonesia, utamanya Batavia, Surabaya, Semarang, Makassar, juga Yogyakarta. Kota-kota tumbuh pesat dengan diwarnai munculnya bangunan-bangunan baru untuk berbagai fungsi.

### **Surabaya**

Menurut versi resmi Pemerintah Kota Surabaya, Kota Surabaya berdiri tanggal 31 Mei 1293 (Hidayat 1975:103). Pada periode awal Surabaya tampaknya belum terbentuk sebagai kota. Ia merupakan desa kecil di tepi pantai, tetapi pada periode berikutnya kawasan tersebut menjadi pusat pemerintahan. Di kawasan tersebut memerintah seorang bupati yang merupakan pemimpin masyarakat Bumiputra setempat. Pada abad ke-18 kota Surabaya mulai dikuasai oleh kolonial Belanda, walaupun keberadaan orang-orang Belanda di kota ini sudah ada sejak abad ke-17.

Sejak Belanda mulai memerintah di Surabaya, kota ini dipimpin oleh dua pemerintahan, yaitu pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh seorang residen dan pemerintah Bumiputra yang dipimpin oleh seorang Bupati. Pusat pemerintahan kolonial Belanda berada di kawasan Jembatan Merah, yaitu di gedung karesidenan yang berada tepat sisi barat jembatan yang melintang di atas Sungai Kalimas, sedangkan pusat pemerintahan Bumiputra berada di kawasan Taman Raja, yang saat ini berdiri gedung kantor pos.

Kantor Residen Surabaya yang berada di kawasan Jembatan Merah bertahan sampai awal abad ke-20, karena pada tahun 1920an kantor tersebut dirobohkan. Pada saat itu status administrasi karesidenan mulai tidak berfungsi dan kota Surabaya telah ditetapkan sebagai kota otonom dengan status *gemeente*. Berdirinya Gemeente Surabaya disahkan melalui *Staatsblad* No. 149 Tahun 1906 (Basundoro 2012b:7). Sistem administrasi *gemeente* dipusatkan di balai kota atau yang dikenal dengan sebutan *stadshuis*. Balai Kota Surabaya pada awalnya menyewa gedung secara berpindah-pindah sampai akhirnya pada tahun 1925 berhasil dibangun balaikota permanen di kawasan Ketabang (Basundoro 2013:156). Sampai saat ini gedung tersebut masih dimanfaatkan sebagai balai kota tempat berkantor Walikota Surabaya. Gedung Balai Kota Surabaya saat ini telah ditetapkan sebagai bangunan

cagar budaya tipe A. Balai Kota Surabaya merupakan gedung yang sangat megah, dirancang oleh arsitek G.C. Citroen, seorang arsitek kelahiran Amsterdam yang menetap di kota Surabaya sejak tahun 1915 (Handinoto 1996:192).



Gambar 3. Balai Kota Surabaya pada Masa Kolonial  
(sumber: kitlv.nl)

Keberadaan gedung balai kota menjadi bukti penting perjalanan sejarah pemerintahan Kota Surabaya. Selama masa kolonial Belanda, Kota Surabaya dipimpin oleh delapan walikota atau yang disebut sebagai *burgemeester*. Pada tahun 1942 pemerintah Kota Surabaya mengalami perubahan drastis karena kedatangan tentara Jepang. Belanda berhasil diusir oleh Jepang dan Jepang-lah yang kemudian berkuasa hingga tahun 1945 (Frederick 1989:115).

Selain terjadi perubahan pada lembaga pemerintahan, selama masa kolonial Kota Surabaya juga mengalami perubahan yang cukup radikal pada sektor perdagangan dan industri. Sejak abad ke-18, Belanda mengembangkan kawasan Jembatan Merah menjadi kawasan perdagangan dan hunian orang-orang Belanda. Di sepanjang Hereenstraat (saat ini berganti nama menjadi Jalan Rajawali), didirikan kantor-kantor dagang dan pertokoan. Di kawasan ini pula pada tahun 1829 didirikan kantor cabang De Javasche Bank yang merupakan bank sentral pertama di Hindia Belanda (Darsono 2016:44). Di tepi Sungai Kalimas juga berdiri banyak kantor dagang.

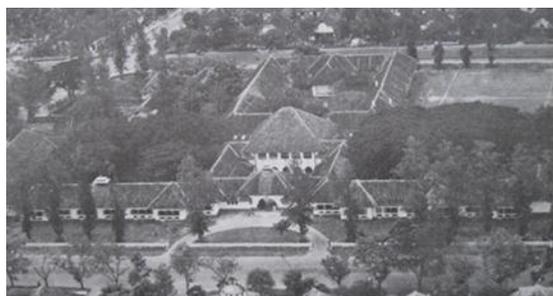
Kawasan Jembatan Merah mengalami perkembangan pesat sejak akhir abad ke-19. Berbagai kantor dagang dan perbankan didirikan di kawasan ini, menjadikan kawasan Jembatan Merah sebagai pusat bisnis terkemuka di Hindia Belanda. Pada tahun 1911 perusahaan dagang Lindeteves Stokvis mendirikan kantornya di selatan kawasan Jembatan Merah. Gedung tersebut dirancang oleh bisro arsitek Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers, yang juga merancang gedung De Javasche Bank Surabaya. Kedua gedung tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Pada tahun 1920-an, perusahaan dagang Handelsvereniging Amsterdam (HVA) mendirikan gedung untuk kantor perusahaan tersebut di Comidiestraat. Gedung tersebut juga dirancang oleh Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers. Gedung tersebut dapat dikatakan merupakan kantor paling megah di kawasan Jembatan Merah (Handinoto 1996:208). Selain kantor HVA, di kawasan Willemsplein didirikan pula kantor dagang Internatio.

Kawasan Jembatan Merah telah menjadi salah satu simbol atau penanda bahwa Kota Surabaya merupakan kota dagang. Setelah kawasan Jembatan Merah penuh,

aktivitas bisnis bergeser ke arah selatan mengikuti jalan dari Surabaya pusat menuju ke Surabaya selatan. Mula-mula kawasan Pasar Besar menjadi pusat bisnis baru, terus bergeser lagi ke kawasan Gemblongan, dan pada akhirnya berkembang pula kawasan Tunjungan.

Tunjungan merupakan kawasan perdagangan baru yang bangkit setelah krisis ekonomi tahun 1930-an. Persis di mulut Tunjungan di sebelah kiri jalan berdiri megah sebuah toko berlantai empat yaitu Toko Whiteaway yang oleh lidah Surabaya selalu disebut sebagai Toko Witawai. Bangunan toko ini menjadi salah satu bangunan yang paling menonjol di sepanjang Jalan Tunjungan karena selain terdiri atas empat lantai, bangunan tersebut juga bergaya arsitektur khas Eropa (Swara Masyarakat 23 Juni 1955).

Selain sebagai kota bisnis atau kota dagang, Surabaya juga dikenal sebagai kota pendidikan. Sejak awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda lembaga pendidikan dasar dan menengah yang awalnya ditujukan untuk anak-anak Belanda dan keturunan priyayi Bumiputra. Menurut von Faber, lembaga pendidikan pertama di kota Surabaya didirikan tahun 1822 oleh C.C. Werner (von Faber 1931:251).



Gambar 4. HBS Surabaya di Ketabang, saat ini digunakan sebagai tempat SMAN 2 Surabaya (sumber: *Jubileumboek HBS Soerabaia 1875-1975*; Den Haag: TP, 1975)

Sekolah menengah yang cukup terkenal di kota Surabaya adalah Hoogere Burgerschool (HBS). Sekolah ini didirikan pada 1875, awalnya menempati kawasan bekas kabupaten di sekitar Kebon Rojo. Pada awal abad ke-20, HBS Kota Surabaya merupakan salah satu sekolah terkemuka di Indonesia. Pada tahun 1923, HBS Surabaya menempati gedung baru yang lebih luas di kawasan Ketabang, sebelah timur Balai Kota Surabaya. Dengan pemindahan lokasi sekolah tersebut di tempat yang lebih luas, jumlah muridnya pun bertambah banyak.

Selain pendidikan dasar dan menengah, di kota Surabaya juga didirikan lembaga pendidikan tinggi terkemuka, yaitu *Nederlandsch Indische Artsen School* (NIAS) atau yang mendidik masyarakat dalam bidang kedokteran. Pendirian NIAS disahkan melalui beslit Gubernur Jenderal Nomor 42 tanggal 8 Mei 1913 dan dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 365 Tahun 1913. NIAS pada awalnya menempati sebuah gedung di kawasan Kedungdoro, dan pada tahun 1923 pindah ke gedung baru yang khusus dibangun untuk kepentingan perkuliahan di kawasan

Karangmenjangan. Gedung NIAS saat ini ditempati oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tipe A. Selain untuk merunut sejarah pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan, bangunan-bangunan cagar budaya yang tersebar di kota Surabaya bias dijadikan rujukan untuk merekonstruksi sejarah dengan tema-tema beragam.

### **Makassar**

Makassar merupakan kota terbesar di Sulawesi dan di Indonesia timur. Kota ini memiliki peran yang amat sentral sebelum masa kolonial. Pelabuhan Makassar telah menjadi pusat perdagangan sejak masa Kerajaan Gowa. Pedagang dari berbagai negeri singgah di pelabuhan ini untuk membongkar barang dagangannya serta memuat barang-barang dari kawasan setempat untuk dijual ke luar negeri (Anonim 1972:1).

Pelabuhan Makassar merupakan penopang utama Kerajaan Gowa. Pelabuhan tersebut memiliki peran penting bukan hanya untuk basis perdagangan tetapi juga untuk basis perluasan kekuasaan kerajaan tersebut. Pada abad ke-17 Pelabuhan Makassar semakin ramai dan menjadi pusat perdagangan utama dan simpul Indonesia bagian timur. Pada periode ini telah berdiri kantor perwakilan dagang dari berbagai negara, di antaranya Inggris, Belanda, Denmark, Portugis, Cina, dan negara asing lainnya (Tika 2013:12). Keberadaan pelabuhan Makassar menjadi faktor utama perkembangan kota Makassar di kemudian hari.

Sejarah Kota Makassar mengalami perubahan drastis sejak VOC berusaha menguasai kerajaan tersebut. Kedatangan pasukan VOC sempat mendapat perlawanan sengit dari Raja Gowa Sultan Hasanuddin. Rongrongan Belanda semakin intensif pada 1667, sehingga sepanjang tahun tersebut beberapa kali terjadi pertempuran yang mempertemukan keduanya. Peperangan yang panjang itu kemudian berakhir dengan sebuah kesepakatan damai yang disebut Perjanjian Bongaya. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 dan sekaligus menjadi tonggak sejarah baru bagi Makassar karena sejak saat itu mereka harus hidup di bawah pengawasan VOC. Salah satu dampak penguasaan Makassar oleh VOC adalah rusaknya Benteng Somba Opu. Sejak saat itu nyaris kekuasaan Bumiputra di Makassar dan sekitarnya mengalami kehancuran (Sukatanya 2000:8-9).

VOC mulai menguasai Makassar dengan pertama kali mengambil alih Benteng Makassar dan mengganti namanya menjadi Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam. Benteng tersebut menjadi pusat kekuasaan dan pertahanan Belanda di kota Makassar pada periode awal. Belanda juga mulai menata kawasan sekitar benteng dengan membaginya menjadi beberapa kawasan, antara lain, (1) kawasan Fort Rotterdam yang merupakan pemukiman Belanda, (2) perkampungan di sebelah timur Fort Rotterdam yang disebut sebagai "perkampungan pedagang" *Vlaardingen*, yang merupakan permukiman bagi orang-orang asing termasuk etnis Tionghoa, (3) Kampong Melayu yang dihuni oleh orang-orang Melayu. Sementara

itu, perkemapanungan untuk penduduk setempat menyebar di beberapa tempat di luar kawasan Fort Rotterdam (Sumalyo 2002:49).

Sejalan dengan makin kuatnya pengaruh pemerintahan kolonial di Kota Makassar, pendirian bangunan baru milik pemerintah atau swasta juga semakin kelihatan. Meskipun demikian, hingga akhir abad ke-18 struktur tata kota tidak banyak mengalami perubahan, sebab lingkungan di sekitar Benteng Fort Rotterdam masih menjadi lingkungan yang eksklusif bagi VOC.



Gambar 5. Kawasan Fort Rotterdam Makassar yang merupakan pusat kekuasaan VOC sejak abad ke-17 (sumber: Sumalyo 2002:48)

Pada akhir abad ke-19 keadaan politik di Kota Makassar mulai aman, sehingga pusat kehidupan orang-orang Belanda yang semula terfokus di dalam Fort Rotterdam mulai ditinggalkan dan beralih keluar benteng (*extra muros*). Upaya itu dimulai dengan memindahkan beberapa unit bangunan keluar benteng, di antaranya pada tahun 1885, di sebelah timur Fort Rotterdam telah dibangun kediaman Gubernur Belanda di Hooge Pad, dan di tempat yang sama juga didirikan Gereja (Tim Penyusun 2013:12)

Setelah kediaman Gubernur dibangun di Jalan Hooge Pad, tidak jauh dari lokasi tersebut juga dibangun rumah seorang residen. Selain bangunan pendukung pemerintahan di atas, pada saat itu juga mulai banyak dibangun rumah dan

gedung lain dengan bahan batu, yakni di sebelah selatan lapangan Karebosi, sehingga membentuk pola struktur kota.



Gambar 6. Jalan Hooze Pad, Makassar; tampak bangunan gereja (sumber: tropenmuseum.nl)

Memasuki abad ke-20 perkembangan Kota Makassar semakin kompleks, diawali dengan ditetapkannya kota tersebut sebagai kota otonom dengan status gemeente pada tahun 1906 dan ditingkatkan lagi menjadi *stads gemeente* pada tahun 1938 (Basundoro 2012a:111). Dengan status tersebut, penguasa kota memiliki keleluasaan untuk mengatur pembangunan kotanya tanpa harus tergantung pada kebijakan gubernur jendral di Batavia. Pada tahun 1918 di Makassar dibangun balaikota atau *gemeentehuis* atau *stadshuis* yang menjadi pusat pemerintahan Gemeente Makassar. Saat ini bangunan tersebut telah dialihfungsikan menjadi Museum Kota Makassar dan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

Setelah kota Makassar ditetapkan sebagai kota otonom, pendidikan di kota tersebut juga berkembang pesat. Pemerintah kolonial Belanda mulai mengenalkan pendidikan Barat pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1869 Direktur van Onderwijs Eredients en Nijverheid, mengeluarkan keputusan nomor 5636 tertanggal 13 Juli 1869 tentang pendirian sekolah kelas dua atau *Tweedeschool*. Pada tahun 1904, di Distrik Ujung Tanah juga dibangun sekolah dasar untuk umum dan dalam tahun yang sama juga dibangun sekolah dasar untuk umum di selatan Karebosi (sekarang), yang kemudian berubah menjadi Hollands Inlandsche School (HIS). Pada tahun 1907 orang-orang Ambon yang tinggal di Kota Makassar juga dibangun sekolah yang diberi nama Holland Ambonesche School (HAS), sedangkan untuk orang Cina dibangun sekolah Holland Chineze School (HCS) (Said 2013:6).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pangrehpraja (*binnenlandbestuur*), pada tahun 1910 dibukan pula sekolah OSVIA (Opleidingschool voor Inlandsche Ambetenaren). Sekolah tersebut merupakan sekolah menengah yang mendidik anak-anak Bumiputra untuk menjadi tenaga pangrehpraja. Namun, keberadaan sekolah tersebut tidak terlalu lama karena pada tahun 1934 ditutup dan digabung dengan MULO (Middlebaare Uitgebruik Lagere Onderwijs) yang telah berdiri pada tahun 1920. Sekolah MULO diawasi langsung oleh Residen Sulawesi Selatan. Mereka yang bisa masuk lembaga tersebut adalah lulusan HIS, HAS, HCS, dan VVS dengan persyaratan tambahan, baik yang berasal dari anak kalangan kolonial

maupun anak-anak bumiputera. Mereka yang diterima di MULO harus sudah mahir berbahasa Belanda (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan 2003:24).



Gambar 7. MULO Makassar Tahun 1924

(sumber: <https://ujungpandangheritage.wordpress.com/2012/02/22/makassar-past-and-present/>)

Dari berbagai bangunan gedung sekolah yang didirikan di Makassar pada masa kolonial Belanda, saat ini yang masih terawat dengan baik adalah gedung MULO. Saat ini gedung tersebut dimanfaatkan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Gedung tersebut merupakan salah satu peninggalan sejarah yang bermanfaat untuk penelusuran sejarah pendidikan kota Makassar.

### **Yogyakarta**

Kota Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa di Indonesia. Kota ini berdiri pasca-Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang menandai perpecahan Kerajaan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Yogyakarta dibangun oleh Mangkubumi yang ketika naik tahta bergelar Hamengkubuwono I. Hamengkubuwono I segera membangun istana di kawasan Hutan Bringan. Istana atau kraton baru tersebut terletak di padukuhan yang disebut Pacethokan. Kraton baru tersebut mulai ditempati tanggal 7 Oktober 1756 (Anonim 1956).

Selain menjadi pusat kekuasaan, Kraton Yogyakarta menjadi pusat kota yang menjadi sentral aktivitas ekonomi dan politik di Yogyakarta. Konsep negara-kota yang digunakan di Yogyakarta merupakan warisan sistem ketata-negaraan Mataram. Kartodirdjo (1987 dalam Handinoto 2015:40) menjelaskan bahwa konsep ketatanegaraan Mataram yang dianut oleh Hamengkubuwono I dalam mendirikan Kraton Yogyakarta terdiri atas pembagian wilayah yang disebut (1) *Negara* atau *Kuthagara*, (2) *Negara Agung*, (3) *Mancanegara*, (4) *Pesisir*. Dalam kerangka ini, Kraton Yogyakarta merupakan pusat kota dalam sistem negara-kota Jawa yang menjadikan Sultan sebagai sentral dari aktivitas kegiatan di pusat kota.

Negara Agung adalah daerah-daerah satelit yang berada di sekitar pusat kota yang merupakan aglomerasi dari kegiatan pusat kota. Di Negara Agung ini, Sultan mengangkat *patuh* yang bersama dengan bekel-bekel-nya mengawasi dan memungut pajak atas pengelolaan tanah yang oleh Sultan telah didistribusikan pada khalayak atas azas hak guna pakai (Handinoto 2015:27). Sementara itu,

mancanegara dan daerah pesisir merupakan daerah yang jauh dari pusat kota yang dipimpin oleh bupati yang tidak diangkat langsung oleh Sultan dan juga tidak bertanggung jawab langsung pada Sultan, tetapi wajib menghadap dan memberikan hadiah istimewa pada Sultan beberapa kali dalam setahun sebagai wujud kesetiannya. Dengan demikian, aktivitas negara-kota ini menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota yang menjadi basis pemerintahan dan sekaligus perkembangan kebudayaan Yogyakarta.



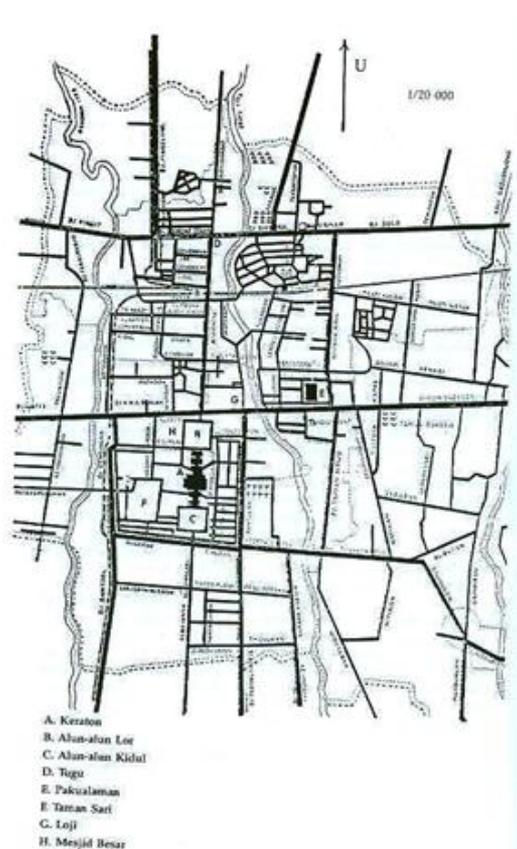
Gambar 8. Kawasan Kraton Yogyakarta pada Periode Awal  
(sumber: <http://yogyatugu.blogspot.co.id>)

Sebagai ibukota kerajaan, orientasi pengembangan Kota Yogyakarta sangat tergantung pada otoritas raja. Penataan kawasan kota juga menjadikan kraton sebagai orientasi utama, yang terlihat secara jelas pada struktur kota. Kota ini dibangun dengan diawali pembangunan benteng kraton dengan penghuni awal adalah sultan (raja/pemimpin kerajaan), para bangsawan yaitu para staf kerajaan, dan abdi dalem yaitu para pegawai rendah di kerajaan. Mereka ini adalah penghuni kawasan *jeron benteng*. Di luar benteng tersebut ada *pasar gede*. Benteng dan pasar menghadap jalan raya yang menghubungkan alun-alun dengan sebuah tugu yang jaraknya dari kraton sekitar dua kilometer. Jalan raya tersebut kemudian menjadi jalan protokol yang diberi nama Jalan Malioboro (Basundoro 2012a:60).

Di sebelah kiri alun-alun jika dilihat dari depan kraton terdapat masjid agung. Masjid dalam tradisi Jawa merupakan rujukan-rujukan bagaimana kegiatan religius yang terorganisasi diberi tempat sebagai bagian pusat kekuasaan. Kampung di sekitar masjid agung dinamakan Kampung Kauman. Disebut *kampung kauman* karena di kampung tersebut berdiam seorang pegawai kraton yang khusus mengurus kegiatan keagamaan (Islam) yang disebut penghulu kraton. Masyarakat awam menyebut penghulu dengan sebutan *kaum*, sehingga tempat tinggal mereka disebut Kampung Kauman.

Sejak Kota Yogyakarta berdiri, kota ini sebenarnya sudah dalam bayang-bayang kekuasaan VOC. VOC melakukan kontrol terhadap Yogyakarta, mengawasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di istana agar selalu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh VOC. Kebijakan tersebut tercermin dengan dibangunnya Benteng Vredenburg yang terletak beberapa ratus meter utara Kraton Yogyakarta. Keberadaan benteng tersebut secara langsung menjadi pengawas kraton. Di awasan

perbentengan tersebut juga dibangun kantor residen, yang dalam perkembangan berikutnya disebut Gedung Agung, lengkap dengan gedung hiburan untuk masyarakat Belanda yang disebut *sociteit* yang berada di sisi selatan kantor residen. Benteng Vredeburg telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) sesuai Ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0224/U/1981 tanggal 15 Juli 1981 yang kemudian diperbarui melalui SK Menteri No249/M/2013.



Gambar 9. Peta Kota Yogyakarta; Kraton sebagai Orientasi  
(sumber: Basundoro 2012a:61)

Kekuasaan Belanda di Kota Yogyakarta telah ikut mengubah wajah kota tersebut, sehingga di kawasan kota Jawa muncul bangunan-bangunan untuk kepentingan masyarakat Belanda dengan corak arsitektur yang khas. Pemukiman untuk masyarakat Belanda pun dibangun di beberapa tempat, antara lain di Bintaran dan Kota Baru.

Bintaran terletak di timur Sungai Code. Kawasan ini berjarak kurang lebih 1 km dari Benteng Vredeburg. Kawasan Bintaran merupakan pemukiman Belanda tertua setelah kompleks Benteng Vredeburg dan Gedung Agung. Di kawasan ini terdapat beberapa kompleks perumahan yang bangunannya bergaya *indies* yang menggambarkan corak bangunan khas Eropa. Di salah satu bekas rumah yang kini difungsikan sebagai Gedung Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) yang berada di Jalan Sultan Agung terdapat satu keterangan yang menunjukkan bahwa rumah tersebut dibangun oleh sebuah perusahaan konstruksi bernama Enthoven &

Co Hage pada 1877 (Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala DIY 1997:76). Dari keterangan tersebut diduga bahwa kawasan pemukiman ini secara umum dibuka pada tahun 1870-an akhir. Rumah-rumah ini difungsikan sebagai rumah dinas opsir Belanda yang bertugas di Yogyakarta akibat dari semakin banyaknya orang-orang Belanda yang tinggal di Kota Yogyakarta.

Citra modern yang muncul dari pemukiman Belanda di Bintaran ini menjadikan daerah tersebut sebagai pusat baru yang juga berfungsi sebagai unit urban strategis. Sebagai unit urban strategis kawasan ini menjadi katalis bagi pengembangan wilayah kota yang dapat menjadi pemantik bagi pembangunan berikutnya. Pada 1890 Pemerintah Keraton Pakualaman membangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai rumah dinas pejabat keuangan Puro Pakualaman bernama Tuan Wijnschenk. Bangunan tersebut kini menjadi museum Sasmitaloka Panglima Besar Sudirman yang terletak di Jalan Bintaran Wetan nomor 3.

Selain itu, pada 1913 dibangun sebuah sekolah yang dikhususkan bagi warga pribumi, Hollandsch Javaansche School (HJS), yang kini menjadi SMP BOPKRI 2 yang beralamatkan di Jalan Sultan Agung nomor 2, Bintaran. Dengan adanya sekolah ini, proses katalisasi pembentukan sistem jaringan antarunit urban semakin terbentuk. Terlebih pada 1934 di kawasan ini didirikan gereja yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi yang kini menjadi Gereja Santo Yusup.

Sektor jasa di Yogyakarta semakin berkembang di pergantian abad ke-20. Dengan semakin pentingnya peran kota Yogyakarta sebagai kota produksi, tidak heran jika banyak para pemangku kepentingan yang datang untuk singgah sementara di Yogyakarta. Kondisi ini merangsang pertumbuhan sektor jasa, terutama di bidang perhotelan. Pada dekade awal abad ke-20 hotel dengan standar yang sangat mewah didirikan di dekat Tugu Yogyakarta dengan nama Naamloose Gennotschap Grand Hotel de Djogja atau yang dikenal dengan Hotel Tugu.

Pada awal kemerdekaan, Kota Yogyakarta memiliki citra sebagai kota pendidikan. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari peranan kraton yang dengan sukarela mendukung pengembangan pendidikan di kota ini dengan didirikannya Universitas Gadjah Mada pada 1949. Kraton menyediakan bangunan dan tanah untuk kepentingan tersebut. Universitas Gadjah Mada akhirnya memiliki kawasan kampus terpadu yang berdiri di atas tanah milik kraton di Kampung Bulaksumur.

## **SIMPULAN**

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan dengan panjang lebar hasil penelitian yang dilakukan di tiga kota dengan mengacu pada permasalahan. Sejarah Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta dapat dibagi menjadi beberapa kronologi, yaitu periode prakolonial, periode kolonial, periode Jepang, dan periode kemerdekaan. Setiap periode memiliki ciri khas tersendiri. Namun, karena periode kolonial menempati kurun yang panjang dan lebih intensif, peninggalan sejarah pada periode tersebut juga jauh lebih banyak. Hal tersebut dapat dilihat pada

bangunan-bangunan periode kolonial yang mendominasi serta telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya di tiga kota tersebut.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan disusun menjadi buku ajar atau buku referensi untuk kepentingan perkuliahan mata kuliah Sejarah Perkotaan. Pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kemenristekdikti yang telah membiayai penelitian ini, serta kepada Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga yang telah membantu proses administrasi dan perizinan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abeyasekera, S. 1987. *Jakarta: A History*. Singapore: Oxford University Press.
- Anonim. 1956. *Kota Jogjakarta 200 Tahun: 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956*. Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun. Yogyakarta.
- . 1972. *Pelabuhan Makassar: Port Administration Makassar*. Makassar
- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta. 2009. *Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.
- Basundoro, P. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- . 2012a. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- . 2012b. *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya*. Surabaya: Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya.
- . 2013. *Merebut Ruang Kota, Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960-an*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Darsono, dkk. 2016. *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*. Bank Indonesia. Jakarta
- Dick, H.W. 2002. *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History 1900-2000*. Athens: Ohio University Press.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan. 2003. *Sejarah Gedung MULO*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan.
- Frederick, W.H. 1989. *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: Gramedia.
- Geertz, C. 1986. *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.

- Handinoto. 1996. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*. Yogyakarta: Andi.
- . 2015. *Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII sampai Pertengahan Abad XX, Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya*. Ombak. Yogyakarta
- Hidayat, W. 1975. *Hari Jadi Kota Surabaya*. Surabaya: Pemerintah Kotamadya Surabaya.
- Irwanto, D. 2010. *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik: Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2013. *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lindblad, J.T. 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makkelo, I.D. 2011. *Kota Seribu Gereja: Dinamika Keagamaan dan Penggunaan Ruang di Kota Manado*. Yogyakarta: Ombak.
- Mattulada. 2011. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, E.L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan: Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Ricklefs, M.C. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Said, A.M. 2013. *Bangunan Bersejarah di Kota Makassar*. Makassar: Balai Pelestari Cagar Budaya Makassar.
- Sukatanya, Y. 2000. *Makassar Doeloe, Makassar Kini, Makassar Nanti*. Makassar: Yayasan Losari.
- Sumalyo, Y. 2002. "Dutch Colonial Architecture and City Development of Makassar." *Dimensi Teknik Arsitektur* 30 (1).
- Tika, Z. 2013. *Makassar Tempo Doeloe, Sulawesi Selatan*. Makassar: Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolahan Data Pemerintah Kota Makassar.
- Tim Penyusun. 2013. *Munculnya Bangunan Kolonial di Makassar*. Makassar: Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.
- Von Faber, G.H. 1931. *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indie's eerste Koopstad van de Oudste tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad (1906)*. Surabaya: Gemeente Soerabaia.